

Observasi Sistem Pencatatan Laporan Keuangan Dengan Bagian Pelayanan Pada Institusi Sektor Publik di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

Isa Ali Ghufron As Sidiq¹, Audita Karisma Jati²

Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

e-mail: asghuf456@gmail.com

Abstrak

Laporan observasi ini membahas penerapan sistem akuntansi sektor publik di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Laporan ini bertujuan untuk mengobservasi dan mengevaluasi sistem pencatatan laporan keuangan pada lembaga sektor publik, yang berfokus pada efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian sistem dengan SAP yang berlaku. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan observasi langsung dan wawancara kepada perangkat kelurahan bagian pelayanan dan keuangan, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik pencatatan keuangan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu utama dalam proses akuntansi keuangan di tingkat kelurahan. Dari hasil observasi, sistem akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan SAP dan memfasilitasi transparansi serta akuntabilitas. Namun, terdapat sejumlah kendala yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan kelurahan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan telah berjalan dengan cukup baik dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SAP. Penggunaan SISKEUDES terbukti mempermudah proses pencatatan, pelaporan, serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, alur pelaporan keuangan juga telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya pengawasan dari kecamatan dan Inspektorat Daerah.

Namun, meskipun sebagian besar lembaga telah menerapkan sistem pencatatan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, implementasi teknisnya masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan sistem, antara lain keterbatasan SDM kompeten dalam bidang akuntansi, kurang optimalnya pemanfaatan fitur aplikasi SISKEUDES, serta kendala teknis dalam pelaporan rutin akibat kurangnya pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan supervisi dari instansi terkait guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Sektor Publik, Pencatatan Laporan Keuangan, Aplikasi SISKEUDES

Abstract

This observation report examines the implementation of the public sector accounting system in Telukan Village, Grogol District, Sukoharjo Regency. The study aims to assess the effectiveness, accountability, transparency, and compliance of the financial reporting system with the applicable Government Accounting Standards (SAP). Using a qualitative approach, data were collected through direct observation and interviews with village officials in the service and finance divisions. The SISKEUDES application is the primary tool used in the village's financial accounting processes.

Findings indicate that the current accounting system aligns with SAP and supports transparency and accountability in financial management. The use of SISKEUDES has streamlined the processes of recording, reporting, and preparing budget accountability documents. Additionally, the financial reporting procedures comply with existing regulations and are monitored by the sub-district and Regional Inspectorate.

However, challenges remain in the technical implementation of the system. These include limited human resources with adequate accounting expertise, suboptimal utilization of SISKEUDES features, and technical difficulties in routine reporting due to a lack of continuous training. Although accrual-based accounting, as mandated by Government Regulation No. 71 of 2010, is generally applied, practical obstacles hinder its full implementation. To improve the quality of village financial management, it is essential to enhance the capacity of local officials and strengthen oversight by relevant institutions.

Keywords: The Implementation Of The Public Sector Accounting System, Financial Report Recording, SISKEUDES Application

1. PENDAHULUAN

Akuntansi Sektor Publik adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam sektor publik. Dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntansi sektor publik memegang peranan vital dan krusial dalam mengelola keuangan negara dan daerah, termasuk tingkat kelurahan. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Fungsinya meliputi perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi alokasi dana public. Berikut adalah peran lebih detail akuntansi sektor publik:

1. Perencanaan dan Penganggaran

- Akuntansi membantu pemerintah dalam merencanakan dan menganggarkan dana publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- Proses perencanaan dan penganggaran melibatkan analisis kebutuhan, prioritas, dan sumber daya yang tersedia, yang semuanya didukung oleh informasi akuntansi.

2. Pengendalian

Akuntansi membantu pemerintah dalam mengendalikan penggunaan dana publik, memastikan dana dialokasikan sesuai dengan tujuan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Ini melibatkan pemantauan transaksi keuangan, pengecekan kepatuhan terhadap peraturan, dan tindakan korektif jika ada penyimpangan.

3. Pelaporan Keuangan

Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan kepada publik melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntansi memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

5. Efisiensi dan Efektivitas

Akuntansi membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, memastikan dana dialokasikan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.

Ini melibatkan analisis kinerja program, evaluasi efektivitas kegiatan, dan identifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Akuntansi menyediakan informasi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja program pemerintah.

Informasi ini membantu pemerintah untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbaikan, dan memastikan bahwa program-program tersebut memberikan dampak yang diinginkan.

7. Integrasi dengan Sistem Informasi

Akuntansi sektor publik dapat diintegrasikan dengan sistem informasi modern untuk memudahkan proses pelaporan dan analisis.

Ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

8. Penerapan Standar dan Peraturan

Akuntansi sektor publik harus mengikuti standar dan peraturan yang berlaku untuk memastikan keandalan dan validitas informasi keuangan.

Ini penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik.

Akuntansi sektor publik di kelurahan berfungsi sebagai alat pengendalian dan pelaporan yang merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan desa/kelurahan. Adapun Peraturan perundangan yang mengatur akuntansi sektor publik di kelurahan antara lain:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur tata kelola keuangan secara menyeluruh termasuk pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur manajemen dana publik.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memuat ketentuan khusus pengelolaan dana desa dan kelurahan.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai pedoman teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merevisi Permendagri No. 113 Tahun 2014, menegaskan kewajiban penggunaan sistem aplikasi keuangan desa (SISKEUDES).

SISKEUDES adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri sebagai platform pencatatan dan pelaporan keuangan bagi kelurahan dan desa. Implementasi sistem ini di berbagai kelurahan mempermudah pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berbagai artikel dan studi terkait akuntansi sektor publik menegaskan pentingnya standarisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik. Hal ini melandasi perlunya kajian lebih mendalam terhadap penerapan sistem akuntansi di Kelurahan Telukan.

2. METODE

Dalam pengumpulan data, dilakukan dua pendekatan utama:

- Wawancara
Dilakukan wawancara mendalam dengan pegawai bagian keuangan dan customer service Kelurahan Telukan. Pertanyaan diarahkan untuk memahami sistem pencatatan, pelaporan, peraturan yang digunakan, alur pelaporan, serta kendala yang dihadapi.
- Observasi
Pengamatan langsung terhadap proses pencatatan transaksi harian, penggunaan SISKEUDES, penyusunan laporan keuangan, serta proses verifikasi dan pelaporan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik nyata sistem akuntansi sektor publik di kelurahan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akuntansi dan Pencatatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap bagian keuangan dan pelayanan Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, ditemukan bahwa sistem akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan mengacu pada sistem berbasis kas menuju akrual, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pendekatan ini merupakan

bentuk transisi dari sistem akuntansi berbasis kas penuh menuju penerapan akrual secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Dalam praktiknya, basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja, di mana transaksi diakui saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Hal ini memberikan kemudahan dalam pencatatan dan pengendalian aliran kas serta memudahkan pelacakan realisasi anggaran. Sementara itu, untuk elemen-elemen neraca seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, digunakan pendekatan akrual. Artinya, pengakuan dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban ekonomi yang terjadi, tidak semata-mata berdasarkan arus kas. Misalnya, aset tetap seperti tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan disesuaikan dengan penyusutan, meskipun tidak selalu disertai dengan transaksi kas secara langsung pada saat itu.

Penggunaan basis campuran ini bertujuan menyeimbangkan kemudahan pencatatan kas sekaligus memberikan gambaran lengkap kondisi keuangan.

Sistem Aplikasi (SISKEUDES)

SISKEUDES menjadi tulang punggung dalam pengelolaan keuangan Kelurahan Telukan. SISKEUDES di Kelurahan Telukan digunakan secara komprehensif untuk beberapa kegiatan penting seperti :

Pencatatan Transaksi Harian

Setiap transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, dicatat secara sistematis dalam aplikasi. Petugas keuangan, khususnya bendahara, memasukkan bukti transaksi secara langsung ke dalam sistem.

Penyusunan Laporan Keuangan

- **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
Menyajikan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana selama periode tertentu.
- **Neraca Keuangan**
Menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas akhir periode.
- **Laporan Operasional (LO)**
Memberikan gambaran atas kinerja keuangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kelurahan.

Pelaporan ke Atas

Data dari SISKEUDES secara langsung dapat disinkronkan atau diekspor untuk keperluan pelaporan ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini mempercepat alur birokrasi dan mempermudah supervisi dari instansi pengawas.

Keunggulan penggunaan SISKEUDES di Kelurahan Telukan antara lain:

Standarisasi data yang memudahkan konsolidasi dan audit : Format dan struktur pelaporan yang seragam memungkinkan proses konsolidasi antar kelurahan menjadi lebih mudah. Selain itu, data yang telah terstandarisasi mempermudah audit internal maupun eksternal karena setiap elemen transaksi memiliki referensi yang jelas.

Real-time data entry sehingga informasi keuangan lebih akurat : Penggunaan sistem berbasis komputer memungkinkan input data secara langsung dan cepat setelah kegiatan transaksi terjadi. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan akibat keterlambatan input dan meningkatkan akurasi informasi keuangan.

Kemudahan akses bagi bendahara dan pejabat terkait : SISKEUDES menyediakan interface yang mudah digunakan, sehingga petugas seperti bendahara, lurah, dan sekretaris kelurahan dapat dengan cepat memantau kondisi keuangan secara langsung. Hal ini mempercepat proses pengambilan keputusan terkait anggaran maupun pengeluaran rutin.

Meski demikian, terdapat juga kekurangannya, yaitu keterbatasan pelatihan bagi petugas baru dan ketergantungan pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai.

Alur Pelaporan

Alur pelaporan sistem keuangan sektoral di Kelurahan Telukan secara umum meliputi: Pencatatan Harian: Perangkat kelurahan melakukan pencatatan menggunakan SISKEUDES atas seluruh transaksi keuangan harian.

Penyusunan Laporan: Bendahara kelurahan menyusun laporan keuangan berkala yang mencakup LRA, Neraca, dan LO.

Verifikasi: Laporan diverifikasi oleh Camat atau pejabat kecamatan untuk memastikan kepatuhan dan keakuratan.

Pelaporan ke Pemerintah Daerah: Laporan dikirim ke pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari konsolidasi keuangan daerah.

Pengawasan dan Transparansi: Laporan juga dipresentasikan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan Inspektorat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Penerima dan Tujuan Pelaporan Keuangan

- Pemerintah Kabupaten/Kota: Laporan keuangan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui dinas teknis yang berwenang. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk pengawasan fiskal dan konsolidasi keuangan daerah. Data keuangan dari Kelurahan Telukan akan diintegrasikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai bagian dari entitas pelaporan yang lebih luas. Hal ini memungkinkan pemerintah kabupaten untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan dana di seluruh kelurahan.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat: Sebagai representasi masyarakat, BPD dan warga Kelurahan Telukan juga menerima informasi terkait laporan keuangan. Proses ini dilakukan melalui forum musyawarah kelurahan, papan informasi, atau media digital. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses langsung terhadap informasi penggunaan dana publik, termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan operasional kelurahan. Hal ini mendorong terbentuknya kontrol sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sehingga memastikan transparansi penggunaan dana dan memberikan ruang partisipasi masyarakat.
- Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Laporan keuangan juga menjadi objek pemeriksaan rutin oleh Inspektorat Daerah, yang bertugas melakukan audit internal terhadap kepatuhan administrasi dan penggunaan anggaran. Selain itu, BPK dapat melakukan audit eksternal, terutama ketika dana kelurahan masuk dalam lingkup pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Audit ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pelaporan ini adalah menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, memenuhi kewajiban hukum, serta menampilkan kinerja keuangan kelurahan secara transparan.

Audit Sistem Akuntansi

Menurut keterangan dari petugas keuangan Kelurahan Telukan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Inspektorat Daerah. Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan kelurahan telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain audit reguler tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat

melakukan audit tambahan, terutama ketika dana kelurahan menjadi bagian dari objek audit yang lebih luas di tingkat kabupaten atau kota.

Proses audit ini menjadi momen penting bagi pihak kelurahan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, termasuk penilaian terhadap laporan keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi SISKEUDES, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional (LO). Hasil temuan audit dapat digunakan sebagai dasar perbaikan sistem administrasi dan tata kelola keuangan di masa mendatang, serta menjadi indikator keberhasilan atau kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang berbasis digital.

Kendala dalam Pengelolaan Sistem Akuntansi

Kendala prinsipal yang ditemui meliputi:

- Sumber daya manusia (SDM): Keterbatasan staf yang memiliki kompetensi baik di bidang akuntansi maupun IT.
- Infrastruktur: Sarana komputer dan akses internet yang kurang memadai menghambat kelancaran pencatatan dan pelaporan secara elektronik.
- Kesalahan dan Keterlambatan Input Data: Masih terjadi kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam menginput transaksi ke sistem.
- Pelatihan dan Pembinaan: Frekuensi pelatihan masih dirasa kurang memadai sehingga keterampilan staf belum optimal.
- Ketergantungan pada Pihak Ketiga: Beberapa kelurahan masih mengandalkan operator khusus yang tidak selalu tersedia.

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan Sistem yang Diterapkan

Kelebihan	Kelemahan
Mempermudah standarisasi pelaporan dengan SISKEUDES	Ketergantungan pada jaringan dan infrastruktur IT
Mempercepat akses dan konsolidasi data keuangan	Kurangnya pelatihan untuk petugas pengguna
Memudahkan audit dan pengawasan	Kekurangan SDM di bidang akuntansi dan IT
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Resiko kesalahan input data akibat keterbatasan staf



(a)



(b)



(c)

Gambar Wawancara di Kelurahan (a) Wawancara Ali dengan salah satu Staff Kelurahan (b) Wawancara Audita dengan salah satu Staff Kelurahan (c) Foto setelah melakukan wawancara

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui peran utama akuntansi sektor publik dalam hal ini peran utamanya adalah sebagai penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Penerapan sistem akuntansi sektor publik di Kelurahan Telukan sudah berjalan sesuai dengan standard SAP dan regulasi pemerintah, khususnya dengan pemanfaatan aplikasi SISKEUDES sebagai basis pencatatan dan pelaporan keuangan. Sistem ini telah berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pengelolaan keuangan kelurahan secara keseluruhan.

Meski demikian, masih terdapat kendala yang terutama pada aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana teknologi yang perlu segera diatasi agar sistem dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan peningkatan pelatihan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan pengawasan, diharapkan sistem akuntansi di Kelurahan Telukan dapat menjadi model bagi kelurahan lainnya dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan publik yang profesional dan terpercaya

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (sudah dicabut).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "SISKEUDES: Sistem Keuangan Desa."

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, Volume 5, No. 1, 2021. "Implementasi SISKEUDES dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Desa."

Jurnal Kompilek, Volume 8, No. 1, 2016. "Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi"

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Rosenbaum, S. (2015). Public Sector Accounting and Financial Reporting. New York: Routledge